



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **PURWANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **204380**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.175.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 209 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 1358 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 1750 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 125.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 325.800.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.700.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOBIL, TERIOS MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 236.600.000
5. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 20.800.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.199.379
F. HARTA LAINNYA	Rp.	192.500.000
Sub Total	Rp.	1.725.299.379
III. HUTANG	Rp.	213.700.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.511.599.379

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.